



Harus Sejahterakan Anak

■ Kota Layak Anak Jangan Hanya Sekedar Predikat

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah melakukan percepatan Kota Layak Anak dengan menyiapkan berbagai unsur pendukung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan pihaknya akan melakukan integrasi dengan semua pihak.

"Kami sampaikan mana yang kurang sehingga kita bisa lakukan akselerasi capaian kriteria penilaian dari standar paku yang disusun Pemerintah Pusat," ucapnya, Rabu (13/2).

Pada dasarnya, lanjutnya, kota layak anak terbangun dari bawah, mulai komunitas, lembaga, bahkan sistem ekonomi yang dijalankan memberikan 31 hak anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

"Mereka ini calon agen perubahan yang harus disiapkan sejak dini. Maka butuh yang namanya kampung ramah anak, keurahan ramah anak, kecamatan ramah anak, dan seterusnya agar mereka ini mendapatkan fasilitas," tandasnya.

Ia mengatakan, sejumlah 21 keurahan yang belum menjadi keurahan layak anak, pada tahun ini ditargetkan 10 di antaranya telah menjadi keurahan layak anak. Selanjutnya, 4 kecamatan yang juga belum mendeklarasikan diri sebagai kecamatan layak anak, bisa diwujudkan pada tahun ini.

"PR lainnya juga ada puskesmas dan sekolah yang belum ramah anak. Ini harapannya juga bisa di tahun ini," tuturnya.

Ia menambahkan, terkait kekerasan kepada anak dari lima tahun silam mengalami penurunan. Termasuk di dalamnya adalah perundungan.

"Kalau itu ada di wilayah, maka Siga yang akan bergerak. Kalau di sekolah, maka pihak sekolah yang akan bergerak," ucapnya.

Khusus kejadian perundungan di sekolah, Edy mengatakan bahwa tidak hanya korban yang akan mendapatkan pendampingan dari psikolog namun juga pelaku yang notabene juga merupakan anak.

"Tidak hanya mengatasi yang terkena kekerasan, tapi juga pelaku. Kecenderungannya, pelaku perundungan ini berasal dari keluarga yang bermasalah," ujarnya.

Sementara itu, Edy juga mengatakan bahwa untuk melakukan percepatan kota layak anak tidak bisa dilakukan pihaknya sendirian. Beberapa OPD sudah menunjukkan kontribusinya selama ini.

"Dinsos dengan berbagai kegiatan sosialnya, dinkes melalui puskesmas yang menggandeng psikolog yang memiliki peran sangat berarti bila ada kekerasan, dan OPD pariwisata maupun pendidikan yang membangun kreatifitas dan kesenian sehingga anak menjadi produktif," ungkapnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan kota layak anak tidak semestinya berhenti menjadi sebuah predikat. Lebih jauh, OPD juga harus mampu melakukan kerja yang sinergi dengan program strategis sehingga tidak ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri dengan program yang tidak jelas dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat. "Jangan membuat program yang di luar program strategis dan tidak bermanfaat.

OPD ini harus jelas program kegiatannya arahnya ke mana," ucapnya.

Dengan begitu, lanjutnya, anak-anak akan mampu merasakan manfaat dari keberadaan kota layak anak. Mereka merasakan diperlakukan dengan memadai dan mendapatkan kesejahteraan.

"Ada sekolah layak anak, maka guru memberikan perlakuan baik. Tidak ada kekerasan. Lalu kecamatan layak anak juga agar anak sejahtera tidak ada pernikahan dini dan kekerasan dan sebagainya," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.		<input type="checkbox"/> Untuk Ditinjau

Beberapa Kampung Ramah Anak Mati Suri

MANTAN Pengurus Forum Anak Kota Yogyakarta, Dyah Ayu menyampaikan bahwa kampung ramah anak tidak semuanya eksis. Beberapa di antaranya justru mati suri. Hal ini dikarenakan beberapa kendala mulai dari tidak adanya pembiayaan hingga dari partisipasi anak-anak untuk menghidupkan kampung ramah anak.

"Sudah disiapkan makanan serta fasilitas yang lain, ternyata anak-anak tidak ada yang datang karena mereka sibuk. Sekarang sekolahnya *full day*. Bisa datang hanya Sabtu Minggu," tuturnya, Rabu (13/2).

Sementara itu, ada juga kampung ramah anak yang berhasil bertahan hing-

ga saat ini. Kuncinya mereka menggandeng beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Terutama untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan ketika menghelar kegiatan.

"Misalkan di Pakuncen itu ibu-ibunya menjual kue. Setengah dari hasil penjualan kue disumbangkan untuk kegiatan anak-anak. Ini yang membuat mereka jadi juara dan juga masih terus jalan hingga saat ini," tandasnya.

Dyah menjelaskan, keberadaan kampung ramah anak sangatlah penting. Melalui kampung ramah anak, aspirasi mereka didengarkan. Pejabat setempat dalam hal ini RW, Lurah, Camat, hingga ke Pemkot. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005